

JURNAL TINDAK LANJUT DAILY REPORT**09 S.D 15 FEBRUARI 2019**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BERITA NEGATIF	SUDAH DITINDAK LANJUT	BELUM DITINDAK LANJUT	KET.
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	2	2		
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	1	1		
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	7	7		
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	1		1	
5	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	2		2	
6	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	4	4		
7	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	4	4		
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	1		1	
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	3	3		
10	Kecamatan Bekasi Barat	1	1		
11	Kecamatan Rawalumbu	1	1		
	JUMLAH	27	23	4	

**DAILY REPORT MEDIA RIVIEW
HUMAS SETDA KOTA BEKASI**

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 09 Februari 2019 INPUT BERITA : 09 Februari 2019									
1	Jalan Kalimalang Depan MM Mirip Kubangan	<p>Bekasi Selatan, Warta Kota.</p> <p>Ruas Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, tepatnya depan Metropolitan Mall (MM) arah ke Jakarta, rusak parah.</p> <p>Kondisi Jalan Kalimalang yang merupakan jalan utama itu berlubang cukup dalam. Apalagi setelah diguyur hujan, lubang jalan tak ubahnya seperti kolam ikan lele. Tak ayal setiap pengendara yang melintas di situ memperlambat laju kendaraannya.</p> <p>Terkadang pengendara motor yang enggan masuk kedalam lubang itu, memilih mencari pinggir jalan yang tidak rusak. Sementara pengemudi mobil juga berhati-hati saat melintasi jalan itu, agar bumper bawah mobil tidak tergerus jalan.</p> <p>Pantauan Warta Kota selama di lokasi, setidaknya ada tiga pengendara sepeda motr hampir terjatuh. Beruntung si pengendara motor masih bisa menahannya dengan kaki meskipun kainnya harus terjerembab ke dalam jalan berlubang yang penuh air itu.</p>	Pengendara motor, dan Penjual minuman, Eki	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Warta Kota (Media Cetak)	<p>Telah dilaksanakan rapat bersama dengan PT. Waskita Karya, PT. KKDM, Mal Metropolitan pada tanggal 15/02/2019 terkait pelaksanaan perbaikan jalan KH Noer Ali. Jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pemkot Bekasi namun karena jalan tersebut masuk ke dalam proyek tol becakayu, sehingga akibat dari kegiatan tersebut sepenuhnya di tanggung oleh PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) selaku pelaksana proyek di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perbaikan jalan tersebut membutuhkan waktu ± 3 minggu dengan rencana jadwal perbaikan jalan akan dilaksanakan pada 16-17 Februari 2019 yang diawali penyesuaian oprit jembatan BCP. Selanjutnya tgl. 18/02/2019 akan dimulai pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan kalimalang sisi utara dari arah Bekasi ke Jakarta sebanyak satu jalur dengan waktu selama 2 minggu mulai 18/02/2019 s.d 03/02/2019. Tgl. 04/03/2019 akan diadakan lanjutan perbaikan ruas jalan selama 7 hari. dan jalan kembali dibuka tgl. 12/03/2019</p>	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
2	Warga Sebut KS NIK Sudah Tidak Sakti Mandraguna	<p>KABARTIGA, Bekasi – Dampak peraturan baru yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Bekasi terhadap peserta Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK), sebabkan sejumlah pasien di tolak Rumah Sakit. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan baru soal pengguna KS NIK yang tidak dapat digunakan, apabila pasien masih terdaftar aktif di kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Ketentuan ini diberlakukan pada 1 Februari 2019.</p> <p>"Kalau waktu itu, saya masih bisa menggunakan KS untuk keperluan therapy urat saraf yang kejepit, walau BPJS saya aktif. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena ada peraturan baru," kata Budi, seorang warga di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, yang berobat di RS Awal Bros Bekasi.</p> <p>Budi mengaku, bukan tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, namun kepesertaannya di BPJS sengaja di non aktifkan akibat keterlambatan pembayaran iuran, sebelum adanya ketentuan baru soal penggunaan KS NIK.</p> <p>"Saya tidak tahu ini ada peraturan baru tentang prosedur penggunaan KS ini, sementara BPJS saya sudah tidak aktif karena waktu itu telat membayar," pungkasnya.</p> <p>Budi juga sempat memohon kepada petugas rumah sakit, agar tetap bisa melakukan therapy seperti biasanya. Sayangnya, permohonan itu tetap tidak bisa dilakukan RS Awal Bros. Ia pun diminta untuk segera mengaktifkan kembali sebagai peserta BPJS.</p> <p>"Tetap permohonan saya untuk bisa therapy pada tulang belakang saya, tidak bisa. Petugas diloket minta saya aktifkan kembali kartu BPJS saya," untkannya</p>	Budi, warga di Kelurahan Margahayu	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	KS-NIK	Negatif	Kabartiga (Media Online)	Program Pelayanan KS-NIK Kota Bekasi masih berjalan di 2019 dan bisa dimanfaatkan warga Kota Bekasi. Pemkot telah melakukan sejumlah langkah evaluasi program KS-NIK di tahun 2018. pada tahun 2019 ini KS-NIK lebih mengoptimalkan tata kelola pelayanan dan persyaratan yang ditempuh untuk tertib administrasi pengguna KS-NIK, termasuk diberlakukannya sistem rujukan berjenjang. Mengenai kepesertaan KS-NIK, sudah diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2018 di Pasal 7 bahwa yang berhak menerima KS-NIK seluruh warga masyarakat Kota Bekasi selain peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran baik dari nasional/daerah. Dengan catatan peserta BPJS Kesehatan non aktif tetap harus dilayani KS-NIK atau diintegrasikan	

TANGGAL BERITA : 11 Februari 2019

INPUT BERITA : 11 Februari 2019

1	Waduh, Kali Bekasi Kembali Berbusa	<p>BEKASI SELATAN - Pencemaran di Kali Bekasi tidak ada hentinya. Kemarin, Kali Bekasi kembali berbusa. Busa yang mewarnai Kali Bekasi tersebut muncul di aliran Kali Bekasi setelah melewati bendungan Kali Bekasi setelah melewati bendungan Kali Bekasi setelah melewati bendungan Kali Bekasi. Kondisi tersebut jelas terlihat dari atas jembatan tepatnya di jalan M. Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.</p> <p>Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengaku heran dengan busa yang muncul tersebut, terlebih busa yang muncul tidak disertai dengan bau menyengat. Disamping itu busa muncul tidak di sertai dengan bau menyengat. Disamping itu busa muncul selepas bendungan Kali Bekasi. Sementara dari hulu tidak terlihat busa walaupun air di bagian sebelum bendungan Kali Bekasi sedikit berwarna hitam.</p> <p>"Karena mulai terjadinya busa adalah mulai setelah bendungan, tapi ke hulunya hampir tidak ada terjadi perubahan ya, walaupun ada sedikit hitam. Tetapi bau tidak ada, ini kita sedang lacak kemudian nanti kita di segmen mana yang terjadi pencemaran dan oleh sebab apa, oleh pabrik atau oleh buangan sepanjang Kali Bekasi ini," katanya, kepada Radar Bekasi. Dia mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi sudah menurunkan tim untuk menelusuri aliran Kali Bekasi. Penampakan munculnya busa di Kali Bekasi ini memang bukan kali pertama, hal serupa beberapa kali kerap terjadi di Kali Bekasi.</p>	Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Kepala Dinas LH Kota Bekasi, Jumhana Luthfi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Pencemaran Lingkungan	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sedang melakukan penelusuran terhadap sumber pencemaran baik industri maupun non industri di sepanjang aliran kali Bekasi	
---	------------------------------------	--	--	------------------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	---	--

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TOPE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
2	Aturan Baru Kartu Sehat Resahkan Warga	<p>Peserta BPJS Aktif Tidak Bisa Berobat Gunakan KS-NIK</p> <p>KOTA BEKASI - Lagi, kebijakan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) bagi warga Kota Bekasi mengundang polemik. Pasalnya, program berobat gratis yang dibiayai APBD setempat itu mengeluarkan kebijakan tidak melayani warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.</p> <p>Padahal, Kartu KS-NIL resmi diterapkan pada 2017, sedangkan BPJS resmi sejak 2014 atau lebih dulu empat tahun. BPJS Kesehatan yang merupakan program pemerintah pusat juga terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akibatnya, kebijakan itu membuat polemik di tengah warga Kota Bekasi.</p> <p>"Saya berobat tidak bisa menggunakan KS-NIK lagi. Karena saya terdaftar sebagai peserta BPJS," terang Ukiyah, 69, warga Perumahan Mustikasari Asri, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jum'at (8/2). Dia tidak bisa menggunakan KS-NIK saat mendaftar operasi katarak di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Margajaya, Kecamatan Bekasi Timur.</p>	Ukiyah, 69, warga Perumahan Mustikasari Asri	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	KS-NIK	Negatif	Indopos (Media Cetak)	Program Pelayanan KS-NIK Kota Bekasi masih berjalan di 2019 dan bisa dimanfaatkan warga Kota Bekasi. Pemkot telah melakukan sejumlah langkah evaluasi program KS-NIK di tahun 2018. pada tahun 2019 ini KS-NIK lebih mengoptimalkan tata kelola pelayanan dan persyaratan yang ditempuh untuk tertib administrasi pengguna KS-NIK, termasuk diberlakukannya sistem rujukan berjenjang. Mengenai kepesertaan KS-NIK, sudah diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2018 di Pasal 7 bahwa yang berhak menerima KS-NIK seluruh warga masyarakat Kota Bekasi selain peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran baik dari nasional/daerah. Dengan catatan peserta BPJS Kesehatan non aktif tetap harus dilayani KS-NIK atau diintegrasikan	
3	Sosialisasikan Dulu!	<p>Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali mengevaluasi program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) bagi masyarakat. Hasil evaluasi tersebut memutuskan, para pemegang kartu BPJS Kesehatan tak lagi dapat menggunakan fasilitas KS-NIK baik di Puskesmas maupun rumah sakit.</p> <p>Menanggapi kebijakan baru itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB Ahmad Ustuchri meminta agar Pemerintah Kota Bekasi melakukan tahapan sosialisasi terlebih dahulu.</p> <p>"Perlu ada proses transisi lewat sosialisasi kepada masyarakat. banyak masyarakat yang punya BPJS Kesehatan enggak bayar iuran karena pikir sudah ada KS-NIK itu," katanya saat dihubungi warta Kota Jum'at (8/2).</p> <p>Perubahan kebijakan penggunaan KS-NIK itu, kata Ahmad Ustuchri juga belum dikonsultasikan dengan Komisi IV DPRD. Ia meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak yang akan dirasakan masyarakat dari perubahan yang tiba-tiba itu.</p>	Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB Ahmad Ustuchri	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	KS-NIK	Negatif	Warta Kota (Media Cetak)	Program Pelayanan KS-NIK Kota Bekasi masih berjalan di 2019 dan bisa dimanfaatkan warga Kota Bekasi. Pemkot telah melakukan sejumlah langkah evaluasi program KS-NIK di tahun 2018. pada tahun 2019 ini KS-NIK lebih mengoptimalkan tata kelola pelayanan dan persyaratan yang ditempuh untuk tertib administrasi pengguna KS-NIK, termasuk diberlakukannya sistem rujukan berjenjang. Mengenai kepesertaan KS-NIK, sudah diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2018 di Pasal 7 bahwa yang berhak menerima KS-NIK seluruh warga masyarakat Kota Bekasi selain peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran baik dari nasional/daerah. Dengan catatan peserta BPJS Kesehatan non aktif tetap harus dilayani KS-NIK atau diintegrasikan	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TOPE	WARTAWAN/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 12 Februari 2019 INPUT BERITA : 12 Februari 2019									
1	Aparat Diminta Larang Truk Masuk Kota Bekasi	<p>DINAS Perhubungan diminta melarang truk yang wara wiri melintas di Kota Bekasi. Apalagi sejumlah ruas jalan saat mengalami kerusakan parah.</p> <p>Pantauan Koran Bekasi, truk memang masih sering berkeliaran di Kota Patriot. Keberadaan angkutan besar tersebut pun membuat para pengendara menjadi resah. Selain menimbulkan kemacetan, pengemudi truk juga sering ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan pengemudi lain.</p> <p>"Mereka sering ugal-ugalan sehingga membuat pengguna jalan merasa terganggu. Oleh karenanya, sebaiknya Dinas Perhubungan dan Kepolisian mengambil tindakan tegas, melarang mereka masuk ke ttengah Kota Bekasi," kata Farid, warga Jalan Perjuangan Bekasi Utara.</p> <p>Selain itu, katanya, truk yang biasanya bertonase tinggi juga membuat jalanan menjadi macet karena memakan sebagian besar badan jalan. "Sudah Bekasi sering macet, ditambah lagi dengan keberadaan truk," katanya, Senin (11/2).</p> <p>Tak hanay itu, truk juga membuat jalanan menjadi cepat rusak karena jalan sebenarnya tidak mampu menahan beban truk. Seperti terjadi di Jalan Raya Perjuangan yang belakangan mulai banyak lubang khususnya di seputar stasiun Kota Bekasi.</p>	Farid, warga Jalan Perjuangan Bekasi Utara	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Lalu Lintas	Negatif	Warta Kota (Medai Cetak)	Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan mengevaluasi perihal truk yang melintas di Kota Bekasi, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.	
2	Jaring Penahan Sampah di Kali Baru Kembali Jebol	<p>BEKASI (Pos Kota)- Baru saja diperbaiki, jaring sampah di Saluran Kali Baru, Jatirasa, Jaitasih kembali jebol. Jaring dari besi itu tak kuat menahan sampah dan terlepas.</p> <p>"Waktu air naik, sampah tertahan jaring. Karena tak kuat sehingga terlepas dari besinya," kata Ismadi, satu warga, kemarin.</p> <p>Jeruji penahan sampah ini pernah jebol akhir bulan lalu. Penyebabnya sama, yakni ketika air pasang dan sampah menumpuk menjadikan jaring tak kuat menahan sampah.</p> <p>"Saya sudah mengira, kagak bakalan kuat nahan sampah. Arusnya kan kenceng," kata Nuryanto, warga Jatirasa, saat itu.</p> <p>Pemasangan jaring sampah masuk dalam program kali bersih. Pemasangan jaring sampah di perbatasan wilayah juga dimaksudkan agar tahu asal sampah.</p> <p>Warga setempat mepertanyakan fungsi jaring karena dianggap tidak tepat. Pasalnya jaring sampah bisa berdampak membuat banjir di wilayah sekitar</p>	Nuryanto, warga Jatirasa	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Sampah	Negatif	Pos Kota (Media Cetak)	Jaring di Kali Baru ini dibuat atas inisiatif pihak Kecamatan Bekasi Selatan Berkoordinasi dengan UPTD Lingkungan Hidup Kecamatan Jatiasih, tujuannya adalah untuk menahan sampah ketika terjadi banjir. Dinas Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Bekasi Selatan dan UPTD Lingkungan Hidup Kecamatan Jatiasih mengenai keberadaan jaring penahan sampah tersebut selanjutnya akan dilakukan evaluasi	
3	Meski Sudah ada Kepwal Guru Bantu PNS dari Kemenag Tidak Terima Uang Transport	<p>REAKSI BEKASI - Pemeintah Kota (Pemkot) Bekasi berupaya keras memperhatikan kesejahteraan tenaga guru agama dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan oleh Kementrian Agama (Kemenag) Kota Bekasi. Untuk merealisasikan kesejahteraan guru agama yang mengajar di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diperbantukan Kemenag di Dinas Pendidikan Kota Bekasi tersebut, tentu harus ada dasar hukumnya.</p> <p>Karena Pemkot Bekasi mengeluarkan Keputusan walikota (Kepwal) Bekasi Nomor 421/Kep.38.D-Disdik tentang bantuan Uang saku untuk Transport kepada Guru Agama yang diperbantukan di Lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi</p> <p>Di dalam kepwal tersebut, sudah jelas diterangkan berapa jumlah guru agama berstatus PNS yang harus menerima dan berapa besaran uang harus di terima setiap bulannya.</p>	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Insentif Transport	Negatif	Reaksi nasional (Media Cetak)		

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
4	Miliaran Rupiah Pajak Reklame di Kota Bekasi Bocor	<p>KanalBekasi.com – Defisit anggaran yang terjadi di Kota pada Tahun Anggaran 2018 lalu disebut karena gagalnya Pemerintah Kota Bekasi mencapai target pendapatan. Dampak dari hal itu, belasan ribu aparatur sipil negara (ASN) terpaksa dipotong untuk mengurangi beban belanja daerah. Pemotongan tunjangan ini diprediksi selama enam bulan atau sampai pertengahan tahun 2019 mendatang.</p> <p>Anggota komisi III Bidang Pendapatan dan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Lilis Nurlia mengatakan Pemkot Bekasi gagal mencapai target anggaran dikarenakan banyaknya pajak pendapatan yang bocor.</p> <p>"Pajak reklame adalah salah satunya, saya yakin banyak potensi pajak yang bocor" Kata Lilis, Senin (11/2).</p> <p>Lilis menyatakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi hanya mendapatkan sekitar Rp 20 Milliar dari Rp 89 miliar yang dianggarkan. Jumlah tersebut, sambung Lilis, sangat jauh dari angka yang diharapkan. Ia menambahkan banyak oknum yang bermain sehingga target pendapatan tidak tercapai.</p> <p>"Kita sudah sering melakukan sidak, namun belum banyak merubah hasil " tambah Lilis</p> <p>Lebih lanjut Lilis menyatakan mestinya Pemkot Bekasi tidak perlu melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sistem "door to door". Karena menurutnya angka tersebut tidak maksimal</p> <p>"Kenapa tidak dimaksimalkan pajak Tempat Hiburan Malam (THM)" tandasnya</p> <p>Pajak THM, sambung Lilis, harusnya bisa didapat secara maksimal. Kelemahannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) tidak tegas di pengawasan.</p>	Anggota komisi III Bidang Pendapatan dan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Lilis Nurlia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pendapatan Daerah	Negatif			
5	Kecamatan Rawalumbu Tolak Warga Bikin Akta Kelahiran	<p>RAKYATBEKASI.COM - Harapan dalam mewujudkan pelayanan prima, memudahkan akses dan kenyamanan bagi masyarakat sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak berjalan mulus. Banyak masyarakat yang dikecewakan oleh pelayanan birokrasi yang berbelit-belit.</p> <p>Sebut saja Danu (24th), ia mengurus pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga untuk sepupunya di Kantor Kecamatan Rawalumbu terpaksa gigit jari, karena berkas yang diajukannya sejak Desember 2018 malah ditolak. Alasan pihak kecamatan menurut Danu lantaran surat keterangan lahir dari rumah sakit di tulis tangan, sehingga berkas yang diajukan tidak bisa diproses.</p> <p>"Sebelum libur Natal dan Tahun Baru berkas saya ajukan ke pihak kecamatan, saya pikir sudah jadi, ternyata belum diproses dengan alasan untuk nama tidak boleh tulis tangan," tutur Danu kepada RAKYATBEKASI.COM, Senin (11/02/2019).</p> <p>Melihat alasan yang dianggapnya tidak realistis, Danu lantas menarik dokumen yang diajukannya pada Jumat (8/2/2019) pekan kemarin. Ia mengaku kecewa dengan buruknya birokrasi di lingkup Kecamatan Rawalumbu.</p> <p>"Mana program Paten? Mana yang katanya Wali Kota mau mempercepat alur birokrasi pengurusan administrasi bagi masyarakatnya. Ini warga Kota Bekasi yang ingin memiliki identitas asli tetapi malah diperlakukan seperti ini. Bukan perbaikan birokrasi namanya, tetapi mempersulit masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan benar," ketus Danu dengan kesal.</p>	Warga Bekasi, Danu (24th)	Kecamatan Rawa Lumbu	Pelayanan Aminduk	Negatif	Rakyat Bekasi (Media Online)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utk pemohon akte kelahiran yg berkas nya tidak lengkap saat itu juga kita kembalikan agar melengkapi berkasnya 2. Surat Keterangan Lahir yg di keluarkan dr pihak Rumah Sakit tidak ada yg berbentuk tulisan tangan melainkan dalam print out computer / hard copy di stempel kecuali surat ket lahir yg di keluarkan oleh DBS (Dokter Bidan Swasta) msh ada yg dlm bentuk tulisan tangan di stempel 3. Berdasarkan data yg ada pd kami Pemohon akte lahir an.VERONIKA ELIORA GULTOM blm teregister pd kantor Kec.Rawalumbu 4. Pemohon akte lahir an.VERONIKA ELIORA GULTOM juga tdk terdaftar pd pemohon akte lahir yg kurang lengkap persyaratannya 	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
								5. pihak kecamatan sudah bertemu dgn pembawa berkasnya (bukan pemohon langsung) selanjutnya verifikasi kelengkapan berkas untuk diproses pencetakan akta lahir dan KK atas nama veronica eliora gultom dan saat ini sudah dicetak tinggal menunggu penandatanganan kepala dinas kependudukab dan catatan sipil kota bekasi.	
TANGGAL BERITA : 13 Februari 2019 INPUT BERITA : 13 Februari 2019									
1	Pedagang Unggas Ganggu Pengguna Jalan	<p>BEKASI UTARA - Puluhan pedagang unggas yakni ayam dan bebek yang berjualan di pinggir Jalan Baru Lingkar Utara, Kelurahan Teluk Pucung mengganggu kelancaran arus lalu lintas di wilayah setempat. Setiap paginya para pedagang menggunakan sisi jalan hingga 50 meter untuk menjajakan dagangannya. Kebereradaannya dikeluhkan pengendara yang melintas akibat lalu lalang pedagang dan masyarakat saat membeli.</p> <p>Salah satu pengendara sepeda motor, Endang (41) mengaku merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di sisi jalan tersebut. Menurutnya, para pengendara tidak leluasa mengendarai motornya saat melintas di jalan tersebut.</p> <p>"Padahal kalau tidak adanya pedagang yang berjualan di jalan itu pengendara bisa leluasa, akibatnya arus lalu lintas juga tersendat," katanya kepada Radar Bekasi, Selasa (12/2).</p> <p>Dirinya sangat menyayangkan keberadaan para pedagang tersebut. Paslnya, sudah ada plang larangan berjualan dari Pemkot Bekasi yang terpasang di lokasi tersebut.</p> <p>"Padahalkan memang jalan baru lingkar utara itu untuk mengurai kemacetan, tapi setelah selesai dibangun dan difungsikan oleh pemerintah malah jadi tempat berdagang, lagi pula sudah jelas ada juga plang larangan berjualan di jalan itu," ujarnya.</p>	Pengendara sepeda motor, Endang (41)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Ketertiban Jalan	Negatif	Radar Bekasi (Media cetak)	Menindaklanjuti daily report yang dimuat di Media Radar Bekasi, dengan ini kami sampaikan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi bersinergi dengan Kecamatan Bekasi Utara dalam hal ini Kasie Trantib Kecamatan Bekasi Utara, mendatangi lokasi jalan baru lingkar utara, dan memberikan arahan serta teguran keras kepada para pedangan unggas untuk tidak beraktifitas menggunakan bahu jalan, tindaklanjut dari teguran tersebut, Satpol PP dan kecamatan bekasi utara, akan berkoodinasi dengan Disperindag mencari solusi relokasi pedagang. demikian disampaikan	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TOPE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
2	Jalan KH Noer Ali Rusak Parah	<p>BEKASI SELATAN - Kendaraan roda empat dan dua mesti memperlambat laju kendaraannya saat melintas sebagian titik Jalan KH Noer Ali, Kecamatan Bekasi Selatan. Karena, terdapat kerusakan jalan yang hingga saat ini belum diperbaiki.</p> <p>Kerusakan tersebut juga memicu kepadatan lalu lintas. Pasalnya, kendaraan harus berhati-hati saat melintas di jalan tersebut.</p> <p>Berdasarkan pantauan wartawan pojokbekasi.com di lokasi, lubang yang terdapat di ruas Jalan KH Noer Ali arah Grand Metropolitan cukup dalam.</p> <p>Pemotor lebih memilih lewat sisi jalan dibandingkan bagian genangan air. Sedangkan, pengendara mobil mau tak mau melewati lubang, hanya saja mereka lebih berhati-hati. Akibat hal itu, arus lalu lintas sedikit memadat.</p> <p>"Banyak yang jatuh karena rusak digenangi air juga. Mereka kira libangnya kagak dalam," kata salah seorang penjaja minuman di dekat lokasi, Eki.</p>	penjaja minuman di dekat lokasi, Eki	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Radar Bekasi (Media cetak)	<p>Telah dilaksanakan rapat bersama dengan PT. Waskita Karya, PT. KKDM, Mal Metropolitan pada tanggal 15/02/2019 terkait pelaksanaan perbaikan jalan KH Noer Ali. Jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pemkot Bekasi namun karena jalan tersebut masuk ke dalam proyek tol becakayu, sehingga akibat dari kegiatan tersebut sepenuhnya di tanggung oleh PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) selaku pelaksana proyek di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perbaikan jalan tersebut membutuhkan waktu ± 3 minggu dengan rencana jadwal perbaikan jalan akan dilaksanakan pada 16-17 Februari 2019 yang diawali penyesuaian oprit jembatan BCP. Selanjutnya tgl. 18/02/2019 akan dimulai pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan kalimalang sisi utara dari arah Bekasi ke Jakarta sebanyak satu jalur dengan waktu selama 2 minggu mulai 18/02/2019 s.d 03/02/2019. Tgl. 04/03/2019 akan diadakan lanjutan perbaikan ruas jalan selama 7 hari. dan jalan kembali dibuka tgl. 12/03/2019</p>	
3	Jalan Kaliabang Bungur Macet Parah	<p>BEKASI UTARA - Ruas Jalan Kaliabang Bungur, Kelurahan Kaliabang Tengah dilanda kemacetan parah, Selasa (12/2) pagi. Namun, tidak ada petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang melakukan penjagaan. Padahal, petugas Dishub biasa berjaga pada hari-hari sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan pantauan Radar Bekasi, kemacetan mengular hingga tiga kilometer di lokasi tersebut. Mulai dari pertigaan Jalan KH Muchtar Tabrani, Jalan Raya Pejuang hingga Jalan Kaliabang Bungur.</p> <p>Pengendara motor, Dewi (37) mengatkan, kemacetan itu lebih parah dibanding biasanya, Bahkan, ia harus memutar balik dan mencari jalan alternatif agar sampai tepat waktu di kantornya Cilincing.</p> <p>"Kemacetan seperti itu tidak biasanya pada hari-hari kerja. Kalaupun macet juga jalan, tetapi ini tidak biasanya, terpaksa harus mutar balik mencari jalan alternatif daripada diem saja di jalan ini. Ya alhamdulillah sampai kantor telat lima menit, coba kalau dipaksakan lewat jalan itu tidak tahu sampe kantor jam berapa," tuturnya Selasa (12/2),</p>	Pengendara motor, Dewi (37)	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kemacetan	Negatif	Radar Bekasi (Media cetak)	<p>Menambah personel petugas lalu lintas untuk mengutrai kemacetan di titik lokasi kemacetan tersebut baik dari petugas lalu lintas & UPTD pada Dinas Perhubungan di Kecamatan Bekasi Utara.</p>	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
4	Pulang ke Rumah Kaki Lebam	<p>Siswa Difabel Diduga Dianiaya Guru</p> <p>BEKASI BARAT - Dunia pendidikan kembali tercoreng kali ini, seorang siswa kelas II Sekolah dasar (SD) Al fajri diduga dianiaya wali kelas. Ironisnya, siswa tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus atau difabel. Akibatnya, bocah laki-laki berinisial JMH (11) ini mengalami luka lebam di bagian kaki kanan dan kirinya.</p> <p>Diduga penganiayaan itu terjadi karena persoalan sepele. JMH lupa membawa buku pelajaran Matematika saat pelajaran berlangsung. " Anak saya lupa bawa buku Matematika dan tiba-toba dimarahi lalu dicubit dan ditendang kakinya," kata ayah JMH, M.Sugih (43) kepada awak media, kemarin Selasa (12/2).</p> <p>Dia menyayangkan kekerasan yang dialami oleh sang anak, apalagi terjadi di sekolah. Sebagai tempat pendidikan, seharusnya guru memberi contohdan tauladan yang baik terhadap anak didiknya. Apalgi sekolah swasta di wilayah Jakasampurna itu merupakan sekolah inklusi atau yang menerima murid berkebutuhan khusus. "Padahal sekolah berkebutuhan khusus, seharusnya dia tahu bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus. Ini kok anak saya malah diginiin," ujarnya.</p>	Ayah JMH, M.Sugih (43)	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Pendidikan	Negatif	Radar Bekasi (Media cetak)		
5	Warga Pengguna Kartu Sehat Keluhkan Prosedur yang Rumit dan Berbelit	<p>KanalBekasi.com – Pelayanan Kartu Sehat (KS) berbasis NIK akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Masyarakat Kota Bekasi yang sebelumnya dimanjakan dengan "Kartu Sakti" tersebut kini dibingungkan dengan peraturan yang dirasa berbelit</p> <p>Salah seorang warga bernama Enu (28) menuturkan dirinya melakukan pengobatan di RSUD dr Casbullah Kota Bekasi, Minggu (10/2) kemarin. Namun dirinya terkejut lantaran KS yang ia miliki ternyata tidak dapat digunakan. "Katanya harus lewat rujukan, padahal telinga saya keluar darah dan butuh cepat penanganan, karna dirasa berbelit akhirnya saya bayar tunai" Katanya, Rabu (13/2)</p> <p>Berbeda dengan Enu, Warga lainnya bernama Opik (58) punya cerita sendiri. Dirinya berencana mencabut giginya lantaran terkadang terasa sakit. Sesuai prosedur yang berlaku dia mengunjungi klinik yang bisa memberikan informasi rujukan, namun menurutnya pihak Klinik mengarahkan ke Puskesmas di wilayah Seroja, Bekasi Utara. " Saya pikir jadi mudah dengan Kartu Sehat ternyata prosedurnya rumit, saya tinggal di Harapan Mulya, kalau harus ke Seroja terlalu jauh" Terangnya</p> <p>Opik menerangkan padahal di wilayah Kalibaru, Bekasi Barat disana terdapat Puskesmas, tapi kenapa diarahkan ke yang jauh. Menurutnya ini prosedur yang tidak efektif</p> <p>"Harusnya ada Kartu Sehat dengan segala evaluasinya bisa membantu warga agar lebih mudah bukan sebaliknya" Pungkasnya.(sgr)</p>	Warga Kota Bekasi, Enu (28)	Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan RSUD Kota Bekasi	Kartu Sehat	Negatif	Kanal Bekasi (Media Online)	Program Pelayanan KS-NIK Kota Bekasi masih berjalan di 2019 dan bisa dimanfaatkan warga Kota Bekasi. Pemkot telah melakukan sejumlah langkah evaluasi program KS-NIK di tahun 2018. pada tahun 2019 ini KS-NIK lebih mengoptimalkan tata kelola pelayanan dan persyaratan yang ditempuh untuk tertib administrasi pengguna KS-NIK, termasuk diberlakukannya sistem rujukan berjenjang. Mengenai kepesertaan KS-NIK, sudah diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2018 di Pasal 7 bahwa yang berhak menerima KS-NIK seluruh warga masyarakat Kota Bekasi selain peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran baik dari nasional/daerah. Dengan catatan peserta BPJS Kesehatan non aktif tetap harus dilayani KS-NIK atau diintegrasikan	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TOPE	WARTAWAN/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 14 Februari 2019									
INPUT BERITA : 14 Februari 2019									
1	Jalan KH Noer Alie Semrawut	<p>BEKASI SELATAN - Kondisi jalan KH Noer Ali Kecamatan Bekasi Selatan saat ini makin semrawut. Peralnya arus lalu lintas tersendat di berapa titik, diantaranya di ruas jalan dari arah Bekasi menuju Jakarta yakni di depan Mall Metropolitan dan di sekitar jembatan Lagoon Apartemen.</p> <p>Di sekitar jembatan Lagoon apartemen terlihat jalan berlubang yang menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Sementara di depan Mall Metropolitan Bekasi Kondisi jalan tidak hanya berlubang namun juga digenangi air sehingga lubang nampak sekilas tidak terlihat.</p> <p>Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Pantauan radar Bekasi, jalan tersebut digenangi air yang berasal dari kalimalang. Posisi ketinggian air lebih tinggi dari pada jalan. Bahkan tidak sedikit warga memilih menghindari jalan tersebut.</p> <p>Warga Kota Bekasi yang tinggal di wilayah Kranji, Royan Al Ramadhan mengaku, sejak hari Senin (11/2) lalu sudah tidak melalui jalan KH Noer Alie Kalimalang. Peralnya arus lalu lintas tidak seperti biasanya. "Dari hari Senin saya tidak lewat lagi, jalurnya lagi kacau, saat ini saya pulang pergi lewat Stadion Bekasi (Jalan Ahmad Yani)," katanya Rabu (13/2).</p>	Warga Kota Bekasi, Royan Al Ramadhan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	Telah dilaksanakan rapat bersama dengan PT. Waskita Karya, PT. KKDM, Mal Metropolitan pada tanggal 15/02/2019 terkait pelaksanaan perbaikan jalan KH Noer Ali. Jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pemkot Bekasi namun karena jalan tersebut masuk ke dalam proyek tol becakayu, sehingga akibat dari kegiatan tersebut sepenuhnya di tanggung oleh PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) selaku pelaksana proyek di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perbaikan jalan tersebut membutuhkan waktu ± 3 minggu dengan rencana jadwal perbaikan jalan akan dilaksanakan pada 16-17 Februari 2019 yang diawali penyesuaian oprit jembatan BCP. Selanjutnya tgl. 18/02/2019 akan dimulai pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan kalimalang sisi utara dari arah Bekasi ke Jakarta sebanyak satu jalur dengan waktu selama 2 minggu mulai 18/02/2019 s.d 03/02/2019. Tgl. 04/03/2019 akan diadakan lanjutan perbaikan ruas jalan selama 7 hari. dan jalan kembali dibuka tgl. 12/03/2019	
2	Duh, Penutup Gorong-Gorong Hilang	<p>BEKASI BARAT - Penutup gorong-gorong yang berada di Jalan I gusti Ngurah Rai, Kelurahan Bintara Jaya, hilang dicuri oleh orang tak dikenal. Akibatnya, jaln tersebut hanya bisa dilalui separuhnya oleh pengendara roda dua dan roda empat.</p> <p>Pantauan Radar Bekasi, lubang gorong-gorong yang berada di tengah jalan itu diberikan pengaman oleh warga dengan meletakkan pohon dan kursi yang diikat tali di sekitar lubang gorong-gorong tersebut.</p> <p>Salah satu warga setempat, Rony (40) mengatakan, hilangnya penutup gorong-gorong terjadi pada Selasa (12/1) dini hari. tidak diketahui siapa yang mengambil penutup gorong-gorong itu, tahu-tahu saat melihat ke jalan sekitar pukul 05.00 WIB sedang menganga tanpa penutupnya," katanya kepada Radar Bekasi, Rabu (13/2).</p> <p>Ia menjelaskan, setelah melihat itu dirinya langsung memberikan penanda dengan meletakkan pohon, bangku, dan tali sebagai pengaman. "Untung saat penutup penutup itu hialng tidak ada pengendara yang celaka," ujarnya.</p>	Warga setempat, Rony (40)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	Penutup gorong-gorong sudah dipasang kembali oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Ait Kota Bekasi	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
3	Warga Bintara Berharap Normalisasi Drainase	<p>BEKASI BARAT - Drainase yang berada di Jalan Bintara, Kelurahan Bintara Jaya, penuh sampah. Hal itu menyebabkan air kerap meluber ke jalan. Warga yang bermukim di jalan Bintara mengharapkan dilakukan pelebaran atau normalisasi drainase oleh pemerintah daerah.</p> <p>Warga setempat, Rohim (51) mengeluhkan meluber air ke jalan. Menurutnya, hal itu disebabkan karena saluran air tidak berfungsi optimal. Terutama, saat hujan mengguyur wilayah setempat.</p> <p>"Tidak hujan saja airnya selalu meluap ke jalan, memang kondisi saluran air saat ini tidak optimal untuk menampung, butuh adanya normalisasi dalam hal ini pemerintah yang bisa mengatasinya, apalagi memasuki musim penghujan, jalan disini sering tergenang," katanya kepada radar Bekasi, Rabu (13/2).</p> <p>Ia menyatakan, pihaknya sudah sempat mengusulkan perbaikan saluran air tersebut dalam Musremban. Tapi, tidak direspon sampai dengan saat ini.</p>	Warga setempat, Rohim (51)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dan Kecamatan Bekasi Barat	Infrastruktur	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	- Titik tersebut akan di lakukan normalisasi secara rutin untuk membersihkan sedimentasi dan sampah untuk jangka panjang akan di lakukan pekerjaan saluran - Sepanjang jalur Jl Bintara dari mulai pasar kranji - sampai perempatan pondok kopi memang jalur saluran air banyak yang mampat tetapi selalu di bersihkan. Yang di maksud dalam pengaduan tidak jelas alamatnya. Admin sudah cek, dan yang tertama ini di depan bank BJB Bintara jaya.	
4	Oknum Petugas Satpol PP Diduga Pungli calon TTK	<p>REAKSI BEKASI - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi diduga kembali tercoreng dengan tingkah WD yang berdinasi di satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.</p> <p>Pasalnya WD diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada korbannya untuk dibantu sebagai calon pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di RSUD Kota Bekasi, beberapa bulan lalu. Hal ini disampaikan Didin Hanafiah (kaka korban) Selasa (12/2).</p> <p>Menurut Didin panggilan akrabnya, kejadian ini bermula ketika WD bertemu dengan dirinya di Asrama Haji Jalan raya Kemakmuran beberapa waktu lalu. Menurutnya, WD mengaku mampu memasukan adiknya untuk menjadi salah satu pegawai TTK di RSUD tanpa menggunakan uang.</p> <p>Namun belakangan ini, WD meminta uang kepada adiknya sebesar Rp. 15 Juta dan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 5 juta. tanpa sepengetahuannya. Curiga dengan tingkah laku WD, kata Didin, ia memfoto uang tersebut beserta kwitansi yang didatangnya.</p>	Didin Hanafiah (kaka korban)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Pungli	Negatif	Reaksi Nasional	Menindaklanjuti daily report dari Media Reaksi Nasional, dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, akan menindak tegas aparatur Satpol PP yang bertindak tidak sesuai dengan kapasitasnya dan melanggar aturan hukum. Terkait oknum WD, Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan teguran keras, sekaligus yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan bertanggung jawab secara pribadi, dan bersedia di proses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan oknum WD, kami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, mempersilahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Demikian yang kami dapat sampaikan.	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
5	Jalan Juanda Kota Bekasi Kerap Tergenang	<p>BEKASI – Drainase buruk dinilai menjadikan sebagian ruas di Jalan Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat kerap tergenang dan lama surut. "Saat hujan sering tergenang dan lama surut," kata Andi, warga, Rabu (13/2/2019). Genangan ini dikeluhkan khususnya di ruas persimpangan Jalan Kartini. Kalau hujan sebentar jalanan akan tergenang karena saluran yang tidak lancar. "Cipratan air kendaraan yang kencang sering mengganggu pengguna jalan lain," katanya.</p> <p>Pengguna jalan juga mengeluhkan karena lokasi genangan tak jauh dari kantor Walikota Bekasi yang lama. Sebaiknya hal ini bisa segera diatasi.</p> <p>Menurut pengamatan genangan dikeluhkan karena kawasan termasuk padat. Lokasi genangan juga berada di persimpangan dimana kendaraan berhenti saat lampu merah menyala.</p> <p>Informasi yang dikumpulkan perbaikan drainase sudah pernah dilakukan. Termasuk menyambung drainase yang melalui Jalan RA Kartini. Saluran baru yang dibuat di jalan ini sebenarnya cukup besar.</p> <p>Sementara, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Arif Maulana belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan.(chotim/b)</p>	Andi, warga	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Banjir	Negatif	Pos Kota (Media Online)	Titik tersebut akan di lakukan normalisasi secara rutin untuk membeersihkan sedimentasi dan sampah	
6	Soal Pungli, Kasatpol PP Kota Bekasi: Kasie Trantib, Bukan Anggota Kami	<p>BERITA BEKASI – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasapol PP) Kota Bekasi, Cecep Suherlan, membantah tudingannya adanya pungutan liar yang dilakukan anggotanya terhadap pemilik Ruko Mitra Bekasi, Pasar Sanggrek, Pasar Baru, yang berlokasi di RT002/RW001, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.</p> <p>"Kalo ditingkat Kecamatan itu Kasie Trantib, bukan Anggota Satpol PP. Kasie Trantib tidak masuk dalam setruktur Satpol PP," terang Cecep kepada Beritaekspres.com, Rabu (13/2/2019).</p> <p>Dijelaskan Cecep, memang Anggota Satpol PP yang ditempatkan ditingkat Kecamatan dibawah Kasie Trantib atau dikenal dengan istilah MP Kecamatan yang memang punya kewenangan untuk memberikan perintah kepada anggotanya yang ditugaskan.</p> <p>"Betul, MP Kecamatan punya kekuasaan untuk memerintah anggota kita yang ditugaskan disana, tapi MP Kecamatan itu, bukan masuk setruktur Satpol PP dia masuknya pejabat setruktural Kecamatan jadi beda, bukan Satpol PP," katanya.</p> <p>Jadi sambung Cecep, dirinya selaku Kasatpol PP Kota Bekasi pastinya sangat keberatan jika uang sebesar Rp10 juta yang dipungut secara bertahap dari pemilik Ruko yang berlokasi di Pasar Sanggrek, Pasar Baru, Kota Bekasi, dengan janji akan menertipkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu merupakan Anggota Satpol PP.</p> <p>"Jelas kita keberatan kalau ada Pungli Rp10 juta dari pemilik Ruko itu dari Satpol PP. Sebab, anggota kita disana tidak merasa menerima coba ditanyakan kepada MP atau Kasie Trantib Kecamatan disana. Kalau anggota kita begitu pasti kita akan tindak," tandasnya.</p> <p>Sebelumnya, Sukamto pemilik Ruko di Pasar Sanggrek, Pasar Baru, Kota Bekasi, menyangkan ketidaktegasan Aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011, tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K-3).</p> <p>"Sebelumnya, bangunan Lapak Pedagang Kaki Lima atau PKL itu sudah dibongkar petugas Satpol PP Kota Bekasi, tapi sekarang faktanya bangunan tersebut sudah bebas berdiri lagi," kata Sukamto kepada Beritaekspres.com, Kamis (24/1/2019) lalu.</p>	Kasatpol PP, Cecep Suherlan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Pungli	Negatif	Berita Bekasi (Media Online)	Menindaklanjuti daily report dari Meida Online "Berita Bekasi" terkait pungutan liar yang dilakukan di pasar sanggrek, Pasar Baru oleh Oknum Satpol PP, setelah ditelusuri kebenaran berita tersebut. Dengan ini kami klarifikasi, tidak bener, anggota Satpol PP melakukan pungutan liar terhadap pemilik ruko di Pasar Sanggrek. Jika ada pungutan liar yang terjadi dapat di pastikan itu bukan dari Anggota Satpol PP Kota Bekasi. Jika ada bukti konkrit yang melibatkan Anggota Satpol PP melakukan pungli, kami harap sampaikan langsung Kekantor Satpol PP Kota Bekasi, dan akan kami proses sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Demikian disampaikan.	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 15 Februari 2019 INPUT BERITA : 15 Februari 2019									
1	Terowongan Bintara Minim Penerangan	<p>BEKASI BARAT - Terowongan di jalan Bintara IV, Kelurahan Bintara Jaya minim penerangan. Padahal, terowongan itu menjadi jalur alternatif masyarakat dari jalan Igusti Ngurah rai menuju Bintara.</p> <p>Hal ini dikeluhkan warga karena selama bertahun-tahun adanya terowongan tersebut belum dilengkapi dengan lampu untuk penerangan.</p> <p>Pantauan Radar Bekasi, terowongan yang berada di pemukiman warga tersebut ramai dilalui pengendara. Namun, keadaannya tidak terurus. Selain banyak lampu, juga terdapat banyak coretan di terowong tersebut.</p> <p>Warga setempat, Jamaludin (45) mengatakan, pengendara yang melintas hanya diterangi oleh lampu dari kendaraannya.</p> <p>"Kalau tidak ada kendaraan yang melintas sangat jelas kegelapannya. Pas adanya terowongan, lampu sudah pernah ada, namun tidak lama bertahan setelah itu tidak terawat lagi. Tidak diberikan lampu penerangan bahkan ekarang kondisinya memprihatinkan sudah terlihat kumuh banyak coret-coretan," katanya kepada Radar Bekasi, Kamis (14/2/2019).</p>	Warga setempat, Jamaludin (45)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Penerangan Jalan	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	Akan dilakukan pengecekan kelengkapan terlebih dahulu setelah itu akan di perbaiki	
2	Traffic Light Mati	<p>Pengendara melintas di bawah traffic light mati di jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kamis (14/2). Keberadaan traffic light mati dikawasan tersebut membuat lalu lintas terlihat semrawut dan menimbulkan kemacetan di jam sibuk.</p> 		Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Lalulintas	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	<p>Mengenai Traffic light di Jl. Chairil Anwar (arah tol timur ke UNISMA) Terdapat 2 Tiang Traffic Light, 1 tiang berukuran tinggi & 1 lagi berukuran pendek. Untuk Traffic light yg berukuran tinggi dalam kondisi mati dikarenakan kabel Traffic Light yang dari tanah korsleting (kerendam air). Dan apabila di aktifkan bisa mengganggu kabel simpang Traffic Light yg lain. Adapun Traffic Light yang berukuran pendek masih berfungsi normal. dan untuk Traffic Light yang berukuran tinggi sampai saat ini sedang dalam proses perbaikan.</p>	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
3	Miris, Lahan Parkir RS Bhakti Kartini Serobot Hak Pejalan Kaki	<p>RAKYATBEKASI.COM - Trotoar jalan, yang seharusnya diperuntukan bagi para pejalan kaki, diduga dijadikan bagian lahan parkir sebagai loket pintu masuk oleh pihak Rumah Sakit Bhakti Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.</p> <p>Ketua Investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Bekasi, Ahamad Gojali mengungkapkan bahwa pihak RS Bhakti Kartini sudah tega mengkebiri hak bagi pejalan kaki dengan merubah fungsi trotoar menjadi loket masuk parkir.</p> <p>"Sementara, jalan trotoar yang digunakan untuk pintu parkir adalah aset dinas PUPR Pemerintah Daerah. Apakah pihak rumah sakit Kartini sudah melakukan MoU dengan Dinas terkait (PUPR) terkait pemanfaatan lahan trotoar untuk kepentingan lahan parkir rumah sakit," ujarnya kepada RAKYATBEKASI, Kamis (14/02).</p> <p>Kalau ditinjau dari proses perizinan IMB, lanjut Ahmad Gojali, diduga pihak Rumah Sakit tidak sesuai sama Garis Sepadan Jalan.</p> <p>"Oleh karena itu kami meminta kepada Dinas Perizinan Terpadu, untuk meninjau ulang proses perizinan IMB rumah sakit Kartini. Dan untuk Kepala Dinas Perhubungan agar meninjau ulang izin Amdal lalin RS Kartini. Karena dampak dari hal itu, selain sudah merampas hak bagi pejalan kaki juga berdampak pada kemacetan. Padahal moment ini bisa dimanfaatin buat penyerapan PAD," tegasnya.</p>	Ketua Investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Bekasi, Ahamad Gojali	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Fasilitas Umum	Negatif	Rakyat Bekasi (Media Online)	Pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan lahan parkir di lokasi tersebut	
4	Mangkrak, Proyek Gedung Dishub Kota Bekasi Rp 17 M, Kajari Ko Diam?	<p>inijabar.com, Kota Bekasi- Proyek pembangunan lanjutan Dinas Perhubungan (Disub) Kota Bekasi yang berlokasi, Jl. Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Dengan pagu anggaran dari APBD 2017-2018, senilai Rp17.699.700.000. No. SPMK; 602.1/30.18/spmk-bg/disperkimntan. Kondisinya dibiarkan terbengkalai.</p> <p>Proyek ini mangkrak sejak bulan Desember 2018 dan akhirnya di stop karena sudah lewat masa pengerjaannya.</p> <p>Ketua Formasi (Forum Remaja dan Mahasiswa Bekasi), Jimmy mengungkapkan, beberapa kejanggalan dari proyek yang dimenangkan oleh PT.Morosait Elibujaya. Dan sebagai konsultan yaitu PT.Wahana Bangun Wisma.</p> <p>"Ironis nya saat di cek ke lokasi perusahaan PT.Morosait Elibujaya ini mencurigakan dari mulai kantor perusahaan tersebut yang beralamat di Jl.Brigjen Katamso, Slipi, kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, yang diketahui sewa atau kontrak di lantai 3 sebuah ruko."Ujar Jimmy. Kamis (14/2/2019).</p> <p>Lalu, sambung Jimmy, kantor cabang di Bekasi tidak ada. Dan diketahui perusahaan yang pernah mengerjakan proyek Sumber Waras ini blacklist menurut data LPSE Jakarta.</p> <p>"Proses pengerjaan bangunan terlihat asal-asalan termasuk para pekerja tidak memenuhi prinsip K3 (keselamatan, keamanan, kerja) dan kondisi tersebut nampaknya seperti dibiarkan saja pekerja dengan resiko keselamatannya," ucapnya.</p>	Ketua Formasi (Forum Remaja dan Mahasiswa Bekasi), Jimmy	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Pembangunan	Negatif	Ini Jabar (Media Online)	Disperkimtan Kota Bekasi telah melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui ULP Kota Bekasi untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan telah dikeluarkan SPK No. 602.1/30.18-SP-BG/ADD/Disperkimtan tgl. 28 Februari 2018. Untuk prinsip prinsip K3 para pekerja Disperkimtan telah menginstruksikan agar mengutamakan keselamatan sesuai dengan standar.	